

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)

Indonesia, Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU No. 28 Tahun 1999, LN No. 75 Tahun 1999

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 24 Tahun 1997

Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, (UUJN), LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 1.

Indonesia, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002

Indonesia, Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 46 Tahun 2009, LN No. 155 Tahun 2009

Indonesia, Ps. 2 UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014.

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), PP No. 37 Tahun 1998, LN No. 52 Tahun 1998

Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874, Huruf a dan huruf b Bagian Menimbang.

B. Buku Literatur

Adjie, Habib, 2011, Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Badruzaman, Mariam Darus, 1996, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Alumni, Bandung.

Burhan, Ashshofa, 1996, Metode Penelitian Hukum, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

- Chazawi, Adami, 2016, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Rivisi), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1982, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Gaol, Sahat Barkat Lumban, 2013, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi terhadap Pejabat yang melakukan kesalahan prosedur”, Jurnal Fakultas Hukum USU, Vol. 2 No. 1.
- Hamzah, Andi, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2005, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kaligis, OC, 2010, Korupsi Bibit & Chandra, Indonesia Against Injustice, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid, 1998, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Marlina, 2011, Hukum Penitensier, Reflika Aditama, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta.
- Minarno, Nur Basuki, 2009, Kewenangan dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2002, Lembaga Pidana Bersyarat, Penerbit Alumni, Bandung.
- Mustofa, 2014, Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT, Karya Media, Yogyakarta.
- Nasution, S., 2011, Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Notodisoerjo, R Soegondo, 1982, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, CV Rajawali, Jakarta.
- , 1993, Hukum Notariat di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

- Prajudi, Atmosudirjo, 1994, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 2010, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Prinst, Darwin, 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 1987, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana, cet.5, Aksara Baru, Jakarta.
- Sapardjaja , Komariah Emong, 2002, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia, Alumni, Bandung.
- Seno Adji , Indriyanto, 2002, Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.
- , 1996, Analisis Penerapan Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- , 2007, Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana, Diadit Media, Jakarta.
- Setiawan, Rachmat, 1991, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, cet.1, Binacipta, Bandung.
- Setiawan, Wawan, 2001, Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara menurut sistem hukum nasional, Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jakarta.
- Sitompul, Jaya P, 2012, “Analisa Yuridis Perbedaan Penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Terhadap Kepala Daerah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Penggunaan APBD Untuk Kepentingan Pribadi Atau Yang Tidak Sesuai Peruntukannya,” (Tesis Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan Kejahatan Ekonomi dan Anti Korupsi Universitas Indonesia), Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1985, Beberapa permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, UI Press, Jakarta.
- , 1986, Pengantar Penelitian Hukum, cet.ke-3, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

- Soemitro , Ronny Hanitijo, 2010, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris), Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Soesanto, R, Tugas, 1982, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sri Mamudji. et. al., 2005, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, cet.ke-1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudharmawatiningsih, 2007, “Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi”, Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 5 No.1 (Oktober 2007)
- Tedjosaputro, Liliana, 1995, Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana), Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Utrecht, E. dan Moh. Saleh Djindang, 1990, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Zainal Abidin Farid, Andi, 1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Media Internet dan Open Source

- Ferdian, Dodi, “KPK Atensi Kasus Kredit Fiktif BNI 46 Pekanbaru”
<https://www.riaumandiri.co/read/detail/58550/kpk-atensi-kasus-kredit-fiktif-bni-46-pekanbaru.html> ,diakses tanggal 20 November 2021
- Sugiyarto, “Terlibat Korupsi, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pamekasan di Tahan”<http://www.tribunnews.com/regional/2015/01/29/terlibat-korupsi-pejabat-pembuat-akta-tanah-di-pamekasan-di-tahan> , diakses tanggal 22 November 2021
- Irwan, Metode Penelitian Hukum, <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses pada tanggal 26 November 2021

D. Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN.MNK tanggal 9 Oktober 2020